

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUPAHAN PEKERJA BORONGAN PADA PERUSAHAAN BULU MATA PT. BRALING WISNU SATRIYA

Oleh : ALMIRA A'ISY HAPSARI E1A015128

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Pengupahan Pekerja Borongan Pada Perusahaan Bulu Mata PT. Braling Wisnu Satriya Purbalingga”. Belum adanya regulasi secara khusus mengenai pengupahan pekerja borongan menyebabkan adanya hak-hak pekerja borongan yang tidak terpenuhi. Perlindungan hukum pengupahan bagi pekerja borongan diperlukan agar pemenuhan hak-hak pekerja borongan lebih terjamin.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengupahan pekerja borongan pada PT. Braling Wisnu Satriya. (2) Menganalisis pengupahan yang dilaksanakan apakah sudah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja borongan PT. Braling Wisnu Satriya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa: (1) Pengupahan yang dilakukan bagi pekerja borongan PT. Braling Wisnu Satriya menggunakan sistem upah borongan, yaitu didasarkan pada banyaknya hasil produksi masing-masing pekerja. Hal tersebut menyebabkan ketidakmerataan upah yang diterima mulai dari dibawah, sesuai atau lebih dari UMK, antara pekerja borongan satu dengan lainnya meskipun hal tersebut dikarenakan kemampuan dari pekerja masing-masing. (2) PT. Braling Wisnu Satriya telah menerapkan beberapa kebijakan perlindungan hukum pengupahan terhadap pengupahan pekerjanya sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun belum sepenuhnya dijalankan tepat dengan isi ketentuan yang tertera pada peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengupahan, Pekerja Borongan

**LEGAL PROTECTION FOR PIECE WORKER REMUNERATION AT PT.
BRALING WISNU SATRIYA EYELASH FACTORY**

By : ALMIRA A'ISY HAPSARI E1A015128

ABSTRACT

This research entitled “Legal Protection For Piece Worker Remuneration at PT. Braling Wisnu Satriya Eyelash Factory”. The absence of specific regulations regarding piece worker remuneration causes rights of piece workers are not fulfilled. Legal protection for piece worker remuneration is needed so it can fulfil the rights of piece worker

This research aims were: (1) to analyze piece worker remuneration at PT. Braling Wisnu Satriya. (2) To analyze the remuneration which has been implemented, has provides legal protection to all the PT. Braling Wisnu Satriya's piece worker. This research method using a normative juridical approach with the statute approach and the analytical approach. The legal materials obtained from library research and interviews.

As the results shown that: (1) The remuneration that used for all piece worker at PT. Braling Wisnu Satriya is payment by result, means the employee is paid based on a worker's quantitative output or production. That causes wage inequality for all the piece worker, because there are some piece worker who got below or above the minimum wage based on their each ability. (2) PT. Braling Wisnu Satriya has providing legal protection under Article 88 Act No. 13 of 2003 on Manpower, but it's still not in accordance with the provisions of regulation.

Keyword: Legal Protection, Remuneration, Piece Worker